

KERJASAMA EKONOMI-PERDAGANGAN ASEAN

BEBERAPA TANGGAPAN ATAS KONSEP ASEAN FREE TRADE AREA

J. PANGLAYKIM

I. PENGANTAR

Pemberitaan tentang perkembangan dan kemajuan ASEAN di berbagai mass media lebih bersifat pemberitaan formil mengenai berbagai pertemuan para Menteri, pejabat senior, pernyataan bersama dan sebagainya, sedangkan informasi yang lebih substantif masih sangat kurang khususnya pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi/perdagangan. Akhir-akhir ini seringkali kita sering mendengar tentang Free Trade Area, package deal, industrial complementarity dan sebagainya. Mungkin karena semua konsep pembahasan dan kesimpulan mengenai masalah ekonomi/perdagangan masih bersifat sementara, maka bahan-bahan tersebut masih belum tersebar secara luas di luar kalangan pejabat.

Karangan singkat ini berusaha memberikan sekedar gambaran tentang beberapa pemikiran para pejabat/ekonom ASEAN mengenai kerjasama ekonomi dan perdagangan. Penulis tidak berpretensi untuk mencakup semua pemikiran yang ada, tapi hanya terbatas pada berbagai pemikiran yang pernah dilontarkan dalam berbagai pertemuan, papers dan sebagainya. Sebagai sumber utama karangan ini adalah beberapa kertas kerja yang disampaikan pada seminar *The ASEAN: Problems and Prospects in a Changing World* yang diadakan di Chulalongkorn University, Bangkok, 18-20 Desember 1975.

II. BEBERAPA PENGALAMAN

Wionzeck¹ dalam bukunya mengatakan bahwa tidak atau kurang berhasilnya LAFTA (Latin American Free Trade Area) bukan karena konsep kerjasama ekonomi regional adalah salah atau tidak dapat dilaksanakan, tetapi karena pemilihan strategi yang tidak tepat. Dalam pengalaman LAFTA strategi yang menghendaki liberalisasi perdagangan dijadikan faktor utama dalam integrasi regional ternyata tidak membawa perkembangan seperti yang diharapkan. Ia juga berpendapat bahwa teknik-teknik kerjasama dan usaha ke arah pengintegrasian, serta pendekatan-pendekatan yang baik dan mungkin dapat diterapkan di negara-negara Barat (EEC dan sebagainya) belum tentu tepat untuk diterapkan dalam suatu *under-development setting*. *Business Week* (January 12, 1976) menyebutkan bahwa pengawasan ketat atas bidang impor telah menggegerkan sektor bisnis. Dengan adanya pengawasan impor yang ketat, tarif akan merupakan salah satu senjata (mekanisme) yang akan dipergunakan.

Tetapi para pemrasaran dalam Seminar Bangkok agaknya lebih cenderung untuk berpendapat bahwa LAFTA diperkirakan telah berhasil sehingga harus merupakan cambuk bagi ASEAN untuk menjadikan Free Trade Area sebagai suatu katalisator. Tetapi melihat keadaan perekonomian Brazil dan Chili, kita dapat bertanya apakah benar liberalisasi perdagangan telah membawa kemajuan pada kerjasama ekonomi regional.

Selanjutnya Wionzeck juga mengatakan bahwa ketegangan (friksi) yang timbul karena kuatnya nasionalisme ekonomi dan ketidak-seimbangan kekuatan ekonomi jangan diabaikan. LAFTA menurut Wionzeck menjadi suatu *preferential trade zone* yang sangat lemah. Akan tetapi ia juga berpendapat bahwa kerjasama regional merupakan salah satu jalan yang efektif dalam meningkatkan perekonomian masing-masing negara anggota jika memilih strategi yang tepat.

¹ Miquel S. Wionzeck, *Economic Cooperation in Latin America, Africa, Asia*, MIT Press, 1969.

III. LAPORAN TEAM PBB TENTANG ASEAN

Laporan Team PBB yang membahas secara terperinci kerjasama ekonomi di antara negara-negara ASEAN nampaknya masih merupakan dokumen dasar bagi studi mengenai kerjasama ekonomi ASEAN. Sayang laporan ini masih belum tersebar luas karena masih terbatas di kalangan resmi saja, yaitu para pejabat tinggi dan beberapa kalangan universitas yang mempunyai hubungan dengan para pejabat tersebut. Karena laporan ini merupakan salah satu sumber inspirasi bagi para pemikir di bidang kerjasama ekonomi ASEAN, ada baiknya jika diketahui oleh sebanyak mungkin peminat. Laporan ini yang secara keseluruhan lebih bersifat pendekatan ekonomis, mungkin dapat dilengkapi dengan suatu studi dengan pendekatan dari sudut bisnis yang pada dasarnya lebih praktis dan dapat menciptakan hal-hal yang lebih konkrit.

Secara singkat laporan PBB mengusulkan:

1. Liberalisasi perdagangan secara selektif (Selective trade liberalization)

Usul team adalah mengadakan pendekatan step-by-step dan item-by-item sehingga teknik negosiasi pada suatu saat mencapai lingkungan yang lebih luas. Dalam jangka panjang diharapkan bahwa sekitar tahun 1990 (laporan ini dibuat 7-8 tahun yang lalu) ASEAN dapat menyetujui suatu ASEAN Free Trade Area. Di sini terlihat adanya suatu time schedule.

2. Persetujuan komplementaris di bidang industri (Industrial Complementary Agreement)

Menurut laporan, teknik ini telah dilaksanakan secara berhasil di Amerika Latin, dengan diserahkan pada sektor swasta. Sektor swasta mengadakan negosiasi dan mempersiapkan suatu rencana kerja dalam mendirikan pabrik-pabrik/unit produksi *large scale* di berbagai negara ASEAN dengan ketentuan jika sesuatu negara ASEAN sudah mendapatkan persetujuan mendirikan sejenis pabrik/unit produksi, maka negara anggota lain tidak mendirikan lagi. Dengan demikian terdapat semacam spesialisasi dalam industri di negara-negara yang memiliki *factor endowment* yang cocok

dan kemudian diadakan pertukaran atau perdagangan hasil-hasilnya di antara negara-negara ASEAN. Contoh yang diambil misalnya pembuatan spare parts di berbagai negara ASEAN lalu dikumpulkan di suatu negara sehingga menjadi mobil, mesin dan sebagainya. Akan tetapi untuk pelaksanaannya antar pemerintah ASEAN harus sudah ada persetujuan tentang tarif, pertukaran, alokasi dan pembagian untung/produk yang seimbang.

3. Package deal

Ini merupakan perundingan antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara-negara ASEAN menuju pembentukan perusahaan large scale dalam bidang *intermediate products*, dan khususnya industri-industri yang belum ada di negara ASEAN. Misalnya kompleks petrokimia, baja dan sebagainya.

4. Team PBB juga mengusulkan kerjasama di bidang pengangkutan, pertanian, perhutanan, keuangan dan usaha-usaha di bidang jasa lainnya. Pada pokoknya laporan ini dianggap sebagai laporan yang mendekati masalah ASEAN secara sistimatis, seimbang dan menyeluruh.

IV. BEBERAPA TABEL DAN CATATAN MENGENAI PERDAGANGAN INTRA-ASEAN

Kekurangan angka-angka dan data merupakan salah satu halangan bagi para analis. Mungkin beberapa angka dan data ini akan berguna yang kami kutipkan dari beberapa kertas kerja yang diajukan pada seminar ASEAN di Bangkok.

1. Per kapita, perkembangan penduduk dan sektor manufacturing dan indikator ekonomi di ASEAN

Tabel 1 dan Tabel 2 menggambarkan pendapatan per kapita, peningkatan jumlah penduduk dan sektor manufacturing serta indikator-indikator ekonomi di negara-negara ASEAN. Dilihat dari sudut pendapatan per kapita kita lihat bahwa Singapura mempunyai pendapatan per kapita sebesar \$2,465,

Malaysia \$ 723, Pilipina \$ 323, Muangthai \$ 292 dan angka untuk Indonesia dari tahun 1973 yaitu \$ 123. Mungkin angka ini sudah mendekati \$ 150/170 pada tahun 1974/1975. Peningkatan jumlah penduduk paling rendah di Singapura, bahkan anak ketiga sudah dianggap sebagai *unwanted child* karena tidak diberi fasilitas dalam hal pendidikan dan sebagainya. Muangthai tampaknya yang tertinggi dengan 3.09%, kemudian Pilipina dengan 3.09%, Malaysia dengan 2.54% dan Indonesia 2.40%. Sumbangan sektor industri kepada GNP menggambarkan Singapura dengan 24.8%, Pilipina 17.4%, Muangthai 17.1%, Malaysia 14.8% dan Indonesia 8.6%.

2. Nilai jumlah perdagangan negara-negara ASEAN

Tabel 3 menggambarkan nilai jumlah perdagangan negara-negara ASEAN di mana volume perdagangan Indonesia memperlihatkan kemajuan yang pesat dibandingkan dengan tahun-tahun 1968/1969.

3. Perkembangan perdagangan intra-ASEAN

Tabel 4 menggambarkan perkembangan perdagangan antara negara-negara ASEAN. Untuk beberapa negara perdagangan dan jasa-jasa merupakan dua sektor yang penting sekali bagi perekonomiannya, misalnya Singapura dan Malaysia. Menurut Lin See-yan perdagangan Singapura merupakan 2/3 dari produk domestik, Malaysia 50% sedangkan Pilipina dan Indonesia masing-masing kurang lebih 20%. Perdagangan antar negara ASEAN pada tahun 1970 masih 17.4% dan menurun sampai kurang lebih 12.8% pada tahun 1974. Perdagangan antara negara ASEAN pada umumnya terdiri dari bahan-bahan makanan (seperti sayur-mayur, cattle food dan sebagainya untuk Singapura, beras dari Muangthai dan sebagainya), bahan-bahan mentah dan entrepot trade. Hasil-hasil industri lain dapat dikatakan belum berarti.

Perincian perdagangan antar negara ASEAN tercantum dalam tabel-tabel berikutnya (Tabel 5 sampai dengan 9). Perdagangan antar negara ASEAN menurut pandangan kami akan menurun karena banyak di antaranya menerima investasi secara besar-besaran dari Jepang. Kekurangan modal, equity dan modal kerja telah menyebabkan Jepang datang ke negara-negara ASEAN dengan sistim

package deal, di mana joint venture itu diberi fasilitas dalam bentuk pembelian mesin-mesin, equipment, bahan-bahan mentah (intermediary raw materials), modal equity dan modal kerja. Dapat dibayangkan bahwa dengan sistim ini, pasar bahan mentah industri diarahkan ke Jepang dan jika joint venture berusaha di bidang perhutanan ekspor langsung diarahkan ke Jepang. Dengan pola yang mengarahkan perekonomian ASEAN ke Jepang, tidak mengherankan jika perdagangan antar negara ASEAN menurun dan sebagian didorong/dialihkan ke Jepang. Mungkin kita semua sudah menyadari hal ini, akan tetapi jika ASEAN secara bersama-sama atau masing-masing tidak menciptakan peralatan dan kapabilitas sendiri secara maksimum, trend ini akan berjalan terus. Ini terlihat sekali dalam Tabel 10 yang menggambarkan arah perdagangan ASEAN.

4. Perdagangan internasional dan ASEAN

Tabel 11 dan 12 menggambarkan perdagangan dilihat dari sudut internasional atas persentase dan jutaan dollar. Antara Tabel 4 yang menggunakan denominasi SDR dan Tabel Sondysuwan yang menggunakan denominasi US\$ terdapat perbedaan dalam persentase, yaitu 13.42% dan 15.6% di tahun 1973. Di sini kita melihat bahwa saham yang terbesar dipegang oleh Jepang dengan 26.36%.

V. BEBERAPA PANDANGAN NEGARA-NEGARA ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PERDAGANGAN

Beberapa pandangan yang diajukan di sini didasarkan atas beberapa kertas kerja yang mengemukakan pandangan pribadi para penulisnya. Akan tetapi melihat kedudukan dan fungsi mereka di negara masing-masing, secara tidak resmi ini merupakan refleksi pandangan pemerintah masing-masing.

Yang jelas para penulis hampir seluruhnya memperoleh pendidikannya di negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat. Bahkan mungkin beberapa berasal dari pusat pendidikan yang sama seperti Harvard, Berkeley, dan sebagainya.

1. Singapura

Dari sudut struktur tarif, Singapura termasuk di antara negara-negara ASEAN yang mempunyai tarif yang terendah. Dahulu Singapura adalah suatu free port dan terutama hidup dari entreport trade. Akhir-akhir ini mereka sudah mulai memasuki era industri. Sumbangan sektor manufacturing pada GNP-nya sudah meningkat sampai kurang lebih 25% di tahun 1973. Walaupun demikian dewasa ini, khususnya dalam krisis internasional, dirasakan sekali kesulitannya mencari pasaran industri di Singapura, karena bagaimanapun sektor perdagangan dan jasa-jasa masih merupakan sektor-sektor yang vital untuk perekonomian Singapura.

Singapura berpendapat bahwa dalam memperlancar perdagangan antar negara ASEAN untuk dapat menarik para investor, *ASEAN Trade Liberalisation Scheme (ATLS)* dan *ASEAN Preference System (APS)* merupakan satu jawaban yang dapat memberikan momentum dan arti pada kerjasama ekonomi ASEAN. ATLS dan APS yang diusulkan oleh Prof. Lim Chong Yah menghendaki:

- a. dihilangkannya secara menyeluruh (over the board) atau sebagian tarif dan halangan-halangan non-tarif di bidang perdagangan untuk barang-barang tertentu.
- b. diadakannya sistim preferensi pada impor dari negara-negara ASEAN dengan mengintroduksikan dua sistim yang rendah untuk negara-negara ASEAN dan lebih tinggi untuk negara-negara non-ASEAN. Dalam rangka ini Prof. Lim mengusulkan suatu *Moratorium* yang memberikan jangka waktu ke arah suatu *Free Trade Area* yang *full fledge* dan penurunan tarif secara menyeluruh. Dalam hubungan ini diperhitungkan bahwa karena adanya posisi yang tidak seimbang dalam perekonomian ASEAN, Prof. Lim mengusulkan suatu skema kompensasi yang harus ditinjau secara terus menerus sehingga dapat diterima oleh semua anggota ASEAN. Pandangan-pandangan Prof. Lim Chong Yah yang diajukan pada seminar di Bangkok agak paralel dengan yang pernah diajukan pada pertemuan antar Planning Ministers pada bulan Nopember 1975 di Jakarta.

2. Malaysia

ASEAN dilihat sebagai suatu bentuk kerjasama yang mempunyai potensi besar dan dapat menjadi akselerator bagi pertumbuhan ekonomi serta dapat mempertinggi taraf hidup rakyat di kawasan Asia Tenggara. Tendensi ke arah impor bahan-bahan industri meningkat sekali dan ada titik kejenuhan pada sektor manufacturing. Dewasa ini masing-masing negara ASEAN membutuhkan antara lain barang-barang modal dan bahan-bahan industri (intermediate goods) sehingga sudah merupakan suatu keharusan negara-negara ASEAN memikirkan pembentukan industri-industri yang lebih kompleks dan sophisticated. Karena dewasa ini *intermediary inputs* umum dibuat di negara-negara industri, maka kita harus membuatnya di ASEAN. Untuk ini tidak saja dibutuhkan modal yang besar akan tetapi juga pembentukan industri-industri tersebut harus berdasarkan economies of scale. Penulis Lin See-yan dari Bank Sentral Malaysia berpendapat bahwa masih terdapat berbagai macam halangan. Halangan dan masalah-masalah yang masih harus dihadapi dan diselesaikan antara lain:

- a. tidak dan kurang majunya kerjasama ekonomi ASEAN secara pesat antara lain disebabkan oleh kurang adanya tujuan yang lebih spesifik dan tidak adanya target serta jangka waktu yang disetujui bersama untuk melaksanakan suatu konsep spesifik.
- b. belum adanya suatu *integrated policy* yang disebabkan oleh belum adanya *time table* yang disetujui.
- c. adanya halangan yang bersifat struktural dan institusionil yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing negara ASEAN dalam waktu yang cepat.
- d. konsep kerjasama regional merupakan konsep yang agak baru untuk ASEAN.

Usul-usul yang diajukan menunjukkan adanya suatu *sense of urgency* dan *sense of timing* yang mungkin memang hidup di antara intelektual di Malaysia. Selanjutnya diusulkan juga adanya:

- a. lalu lintas (free movement) bebas untuk bahan-bahan makanan di antara negara-negara ASEAN.

- b. kerjasama yang lebih erat mengenai suplai bahan makanan dan bahan mentah.
- c. pendekatan step-by-step dan item-by-item dalam liberalisasi perdagangan selektif, dengan menentukan suatu target waktu yaitu tahun 1990, sehingga semua halangan bersifat tarif dan non-tarif dapat dihapuskan.
- d. melaksanakan teknik-teknik komplementaris industri dan persetujuan package deal (seperti diajukan dan diusulkan oleh Team PBB).
- e. suatu pendekatan dan kebijaksanaan yang sama dalam menghadapi masalah komoditi.

3. Pilipina

- a. Pilipina berpendirian agar negara-negara anggota ASEAN secara berangsur-angsur menurunkan tarif dan menghilangkan barrier sehingga dalam jangka waktu yang ditentukan dapat menciptakan suatu ASEAN Free Trade Area. Dalam rangka menciptakan kondisi-kondisi ke arah AFTA, diusulkan agar negara-negara ASEAN tidak mempertinggi tarif-tarifnya dan juga tidak berusaha mengadakan restriksi-restriksi perdagangan yang baru. Pilipina juga mengusulkan agar untuk pertama kali negara-negara ASEAN secara menyeluruh menurunkan tarif, misalnya dengan 10% (Usul ini paralel dengan usul Singapura).
- b. di bidang industri juga ada pemikiran ke arah pembentukan industri-industri yang didasarkan atas prinsip large scale.
- c. dalam rangka pemberian prioritas, diusulkan agar negara-negara ASEAN mempunyai preferensi terhadap komoditi yang diproduksi di ASEAN dan juga mempunyai access pada pasaran produk-produk ini.
- d. dalam rangka masalah komoditi Pilipina berpendapat bahwa harus ada suatu kebijaksanaan dan pendekatan yang sama sehingga negara-negara produsen dapat mempertinggi hasil ekspornya.
- e. kerjasama yang erat diusulkan di bidang investasi luar negeri, perencanaan regional pada khususnya di bidang pertanian dan industri, mengadakan persetujuan komplementaritas, serta mengembangkan sistim

pengangkutan, komunikasi yang vital sekali untuk perkembangan perdagangan intra-ASEAN.

- f. merumuskan kebijaksanaan di bidang keuangan, perburuhan, asuransi dan bidang-bidang jasa yang dapat menyokong proyek-proyek di ASEAN.

4. Indonesia

- a. Indonesia terutama mengusulkan kerjasama yang erat di bidang energi dengan mengadakan survei, eksplorasi, tukar menukar informasi dan sebagainya.
- b. kerjasama yang erat dalam mensuplai, membeli dan memproduksi bahan-bahan makanan, seperti perdagangan beras dengan Muangthai, stabilitas dan promosi perdagangan bahan-bahan makanan regional. Kerjasama dalam riset, input produksi seperti pupuk dan pestisides dan secara bersama mencari pasar untuk bahan-bahan tersebut.
- c. kerjasama dalam perdagangan meliputi aspek-aspek seperti:
- perluasan perdagangan antar negara ASEAN di bidang bahan-bahan makanan, energi dan proyek-proyek industri.
 - secara bersama mencari dan menghadapi pasar internasional, seperti pasaran bersama, riset bersama, kebijaksanaan yang sama, dan sebagainya.
 - berusaha dan membantu kegiatan ke arah diversifikasi ekspor negara-negara ASEAN.
- d. mengadakan pendekatan yang sama dalam masalah komoditi dan masalah-masalah internasional lainnya.

5. Muangthai

- a. Muangthai pada dasarnya menyetujui konsep Free Trade Area atas dasar prinsip tepa slira, dan berpendapat bahwa mereka akan dapat mengambil keuntungan dengan terbentuknya AFTA. Mereka mengusulkan penurunan

tarif secara menyeluruh antara 10-15%. Mereka berpendapat bahwa secara umum ASEAN akan menarik keuntungan dengan terbentuknya AFTA dan kerugian-kerugian dapat diatasi melalui suatu sistim kompensasi dan komplementaritas industri. Mereka juga membicarakan efek polarisasi, yaitu adanya AFTA akan menarik lebih banyak investor.

- b. agar ASEAN dapat memproduksi barang-barang modal dan intermediate bahan mentah, diusulkan agar ASEAN mencapai persetujuan package deal dan complementary industries (sesuai dengan usul Team PBB).
- c. adanya kerjasama moneter termasuk ASEAN Clearing Union, persetujuan mengenai neraca pembayaran, pembiayaan pembangunan dan sebagainya.

VI. IKHTISAR USUL-USUL

Berbagai usul yang diajukan oleh para analis dan pejabat ASEAN dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Usul Malaysia, Pilipina dan Muangthai banyak sekali mengambil inspirasi dari laporan Team PBB dan mendukung sepenuhnya penciptaan ASEAN Free Trade Area yang bersifat step-by-step dan item-by-item, tetapi memberi jangka waktu yang tertentu, misalnya tahun 1990 (sama dengan yang ditargetkan Team PBB). Mereka hendak memberikan kepada kerjasama ASEAN suatu *sense of timing* dan *sense of urgency*.
2. Usul-usul lain seperti komplementaris industri, package deal, kerjasama di bidang bahan makanan, komoditi dan sebagainya juga diusulkan oleh hampir semua negara ASEAN. Kecuali usul-usul Indonesia, usul negara-negara lain umumnya diilhami oleh laporan Team PBB.
3. Singapura mengusulkan suatu moratorium tarif dan non-tarif sehingga dalam jangka waktu yang disetujui bersama ASEAN hendaknya mencapai suatu ASEAN Free Trade Area dengan mengajukan suatu usul prinsip skema kompensasi karena adanya ketidak-samaan perkembangan ekonomi di antara negara-negara ASEAN.

4. Indonesia lebih menekankan pada kerjasama dalam bidang bahan-bahan makanan, energi, cara menghadapi pasar internasional, kebijaksanaan dalam masalah komoditi dan sebagainya dan tidak menyebut aspek liberalisasi perdagangan (free trade).

VII. SUATU PANDANGAN

Pandangan kami terhadap masalah AFTA merupakan pandangan pribadi.

Sebelumnya telah kami kutip pandangan Wionzeck yang mengatakan bahwa mungkin sekali kurang berhasilnya LAFTA antara lain disebabkan karena konsep-konsep yang berlaku untuk negara-negara industri seperti EEC tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa studi yang mendalam. Karena itu dalam mencari konsep dan bentuk kerjasama di ASEAN kita hendaknya tidak mengulang apa yang terjadi di negara-negara Amerika Latin. Bahwa sekarang Brazil berada dalam keadaan yang demikian sulit sehingga harus menciptakan barrier di bidang impor mungkin merupakan suatu indikasi bahwa Free Trade Area pada akhirnya kurang memenuhi harapan para konseptornya.

Kami yakin bahwa dalam konsep Free Trade Area di negara-negara Amerika Latin skema kompensasi juga telah diajukan, tetapi inipun tidak menutup kemungkinan bagi Brazil untuk mencari jalan sendiri dalam penentuan barrier terhadap perdagangan, khususnya impor. Skema kompensasi dapat merupakan arena pertentangan karena suatu negara anggota dengan mudah dapat merasa dirugikan. Prinsip kerjasama antar negara ASEAN pada dasarnya tidak akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan salah satu negara. Sudah barang tentu tidak berarti bahwa dalam mencari bentuk kerjasama kita bisa bersikap ingin menang sendiri, tetapi semangat *give and taken* harus merupakan menyemangati ASEAN.

Dalam hubungan dengan pernyataan tadi, kami kemukakan masalah *equity-debt ratio* yang sudah merupakan suatu kenyataan di dunia internasional (negara-negara industri), tetapi akibatnya kepada negara-negara ASEAN dan khususnya Indonesia mungkin berlainan. Secara teoritis konsep Free Trade Area bagi ahli ekonomi memang mengandung kebenaran, dan

penentuan jangka waktu untuk memberikan sense of urgency juga ada ke-untungannya. Akan tetapi tetap diperlukan adanya suatu studi yang mendalam sebelum kita menerapkan konsep tersebut.

1. Masalah equity debt ratio

Dewasa ini perusahaan/industri yang agak besar/menengah sudah tidak lagi dapat mempertahankan diri tanpa adanya pinjaman dari pihak ketiga. Di Jepang hal ini sudah diterima oleh kalangan bank-bank dan lembaga keuangan, tetapi belum terlalu lama direalisasikan di negara-negara berkembang, antara lain Indonesia. Perusahaan dan industri Jepang hanya dapat berkembang antara lain dengan bantuan sepenuhnya dari lembaga-lembaga keuangan dan bank-bank yang membiayai usaha-usaha dengan bantuan kegiatan ini yang jauh lebih besar daripada modal sahamnya. Demikian juga halnya dengan perusahaan/industri di Jerman. Di Amerika terdapat kombinasi antara pembiayaan melalui sistem perbankan atau dengan mencari modal dari pasar uang dan modal, jadi mencari langsung modal tetap (jangka panjang) dari para investor/publik. Di Inggris sebagian besar perusahaan/industri menarik modal dari investor/publik dan akhir-akhir ini sudah mengikuti pola di Amerika, Jerman dan Jepang. Karena equity-debt ratio sudah merupakan suatu cara kerja bisnis yang nyata, maka di negara-negara industri lembaga-lembaga keuangan serta pasar uang dan modal nasional dan internasional ikut serta dalam memberikan jasa-jasanya. Dengan demikian perusahaan/industri yang menarik modal kerja dalam bentuk pinjaman memperoleh tingkat bunga yang dapat mempertahankan daya saing mereka di pasar internasional.

2. Equity-debt ratio dan struktur permodalan

Secara teoritis berarti bahwa jumlah uang dalam bentuk saham jauh lebih kecil daripada jumlah yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, sehingga struktur permodalan sudah jauh berubah dibandingkan misalnya dengan 25 tahun yang lalu, di mana masih mungkin perusahaan menarik modal dari berbagai pihak dalam bentuk saham. Struktur permodalan jaman sekarang

sudah mengikutsertakan uang dari publik baik secara langsung dari pasar uang dan modal atau melalui bank-bank. Jika kita meninjau equity-debt ratio maka untuk perusahaan joint venture dan perusahaan/industri domestik, struktur permodalan tidak berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan di dunia internasional. Perusahaan/industri besar mempunyai lebih banyak modal dari pihak ketiga daripada modal sendiri. Hanya di Indonesia terdapat perbedaan yang agak menyolok, yang mungkin mempunyai beberapa konsekuensi harus diperhatikan bersama.

3. Struktur permodalan/ratio hutang/modal sendiri di Indonesia

a. Perbedaan dengan negara-negara lain

Karena perbedaan struktur permodalan sebagai akibat kenyataan adanya ratio equity dan hutang. Perbedaan utama mungkin modal dari pihak ketiga yang sebagian mungkin diperoleh dari bank-bank negara dalam bentuk modal domestik. Modal kerja yang diperoleh dari bank-bank negara mungkin tidak bersifat jangka panjang (kecuali modal investasi yang mengharuskan pemilik mempunyai 25% seringkali ini mungkin hanya dalam bentuk tanah dan bukan tunai). Seringkali terjadi modal dalam bentuk hutang jangka pendek dimasukkan dalam investasi yang bersifat jangka panjang sehingga menempatkan bank-bank negara dalam suatu keadaan *fait a complit*. Perbedaan kedua dalam hal ini adalah tingkat bunga dan ongkos-ongkos lain yang harus disediakan, pada umumnya mungkin antara 24-30% setahun dibandingkan dengan di luar negeri antara 10-12%. Perbedaan ketiga, joint venture ini dan khususnya joint venture dengan Jepang untuk sebagian besar modal-equity dan modal kerja serta pinjaman disediakan oleh partner luar negeri dalam bentuk *package deal*. Ini berarti bahwa partner luar negeri sudah memperhitungkan bunga dan margin keuntungan yang dimasukkan dalam bentuk mesin-mesin, peralatan, staf asing, bahan-bahan mentah, royalties, management/technical agreement, dan sebagainya. Dengan demikian *bunga yang bersifat kumulatif* sulit untuk diperkirakan, mungkin sekali tiga atau empat kali tergantung dari bargaining position partner nasional, dari bunga yang kita harus bayar pada bank-bank negara, walaupun dalam bentuk pinjaman bank yang diperoleh melalui joint venture tingkatnya sama dengan dunia internasional.

Tidak saja perhitungan bunga berhenti dengan dibentuknya perusahaan atau industri, akan tetapi hal ini berjalan terus dengan pembelian spare parts (seperti harga mobil Jepang relatif rendah akan tetapi keuntungan diambil kembali dengan harga spare parts yang menurut keterangan relatif lebih tinggi), bahan-bahan mentah, penentuan distributor dan sebagainya sehingga *pembayaran bunga* berjalan terus.

b. Beberapa konsekwensi

(i) Konsekwensi pertama kita lihat dalam struktur perongkosan. Di samping perusahaan mungkin tidak dalam bentuk large scale, struktur perongkosan dengan *cost of money* yang diperlukan untuk memperoleh modal, modal kerja dan pinjaman untuk segala usaha apakah joint venture, investasi domestik dapat dikatakan cukup tinggi. Kalkulasi harga-harga sudah tentu diperberat dengan ongkos yang tidak dapat dibukukan dan ongkos-ongkos administratif lain untuk melancarkan usaha-usaha/industri. Menurut keterangan para industriawan *cost of money* dan berbagai ongkos administratif merupakan komponen-komponen dalam kalkulasi harga yang menyebabkan industri kita kurang bersifat kompetitif dibandingkan dengan kalkulasi-kalkulasi di luar negeri dan negara-negara ASEAN lain (mungkin struktur perongkosan kita dapat menyamai Muangthai). Akan tetapi perlu dicatat di sini bahwa sampai saat ini belum ada suatu studi yang mempelajari aspek ini secara mendalam. Kami berpendapat bahwa ini penting sekali dalam menentukan sampai berapa jauhkah kita dapat dianggap kurang kompetitif dan sebab-musababnya, sehingga secara menyeluruh dan lebih cermat kita dapat mempersiapkan diri ke arah pembentukan suatu industri yang dalam perkembangannya dapat ditingkatkan ke arah lebih kompetitif.

(ii) Konsekwensi kedua adalah bahwa perdagangan kita lebih terarah ke negara-negara yang merupakan sumber modal kerja dan modal pinjaman dalam berbagai bentuk seperti package deal. Konsekwensi ini sudah dapat kita lihat dalam meningkatnya perdagangan kita misalnya dengan Jepang (Lihat Tabel 10).

(iii) Konsekwensi ketiga adalah bahwa perusahaan/industri yang berada dalam lingkungan joint venture, bahkan dalam lingkungan investasi domestik unsur luar negeri mengambil peranan yang menentukan dalam kebijaksanaan perusahaan/industri. Jika pimpinan dalam joint venture atau pinjaman dalam investasi domestik masih cukup tinggi, maka pihak luar negeri yang mengarahkan industri, sehingga kita melihat kontinuitas pembelian-pembelian bahan-bahan mentah dari negara asal partner atau peminjam modal, mesin dan sebagainya. Misalnya pembelian bahan mentah dari Jepang dibandingkan dengan pembelian dari Taiwan seringkali dapat berbeda puluhan persen. Ini berarti bahwa pengekanan terhadap industri mungkin sekali karena ada persetujuan masih berjalan kurang lebih 5-10 tahun. Pada waktu kita dapat mengambil alih mayoritas dalam tangan nasional mungkin sekali cara produksi dan sebagainya sudah ketinggalan dengan perkembangan teknologi.

4. Faktor perkembangan lembaga-lembaga nasional

Faktor lain dalam perkembangan perekonomian nasional adalah lembaga-lembaga nasional, khususnya bidang keuangan, perdagangan, jasa-jasa dan sebagainya. Struktur bisnis kita dewasa ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang beroperasi di sektor bisnis masih bersifat atomistik dan belum memperlihatkan kemampuan serta kapasitas untuk dapat bersaing di tingkat regional dan internasional, kecuali beberapa gelintir saja. Dalam hubungan memperkembangkan kerjasama ekonomi ke arah Free Trade Area dalam jangka waktu panjang kita perlu memperhatikan *institutional building*. Karena jika ini tidak dilakukan maka apa yang dicita-citakan oleh para konseptor Free Trade Area tidak akan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan/industri nasional, sebaliknya hanya mengandalkan perusahaan-perusahaan multinasional dengan perusahaan big ten Jepang akan mengambil peranan yang terpenting di negara-negara ASEAN. Tampaknya Menteri Perdagangan Malaysia Yang Mulia Datuk Musa Hitam (lihat *Suara Karya* tanggal 2 Pebruari 1976) mempunyai pendapat yang sama dengan penulis. Tidak saja kita harus memperkembangkan lembaga-lembaga kita di bidang bisnis dan industri, akan tetapi kita juga

harus memperhatikan ketidak-seimbangan yang masih ada antara perkembangan lembaga-lembaga keuangan kita dengan perkembangan-perkembangan yang lebih pesat di bidang industri. Ketidak-seimbangan ini kita sudah melihat akibat-akibat dan konsekwensinya dalam suplai kebutuhan akan pembiayaan, sehingga dalam equity-debt ratio kita harus mengambil dari luar negeri atau dari partner-partner luar negeri.

VIII. KESIMPULAN

Kami berpendapat bahwa konsep ASEAN Free Trade Area dapat diterima sebagai pemikiran dan prinsip pelaksanaan secara jangka panjang perlu ditentukan sehingga kitapun mempunyai *sense of urgency dan timing*. Jangka waktu panjang ini menurut kami jangan ditentukan sekarang karena kita belum mengetahui secara mendalam aspek-aspek seperti bagaimana dapat mengatasi equity-debt ratio dengan akibat-akibatnya pada struktur perongkosan/kalkulasi harga, penyediaan sumber-sumber dengan cost of money yang lebih kompetitif dan sama dengan dunia internasional. Alangkah baiknya jika ini juga dilakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya sehingga kita dapat mengadakan suatu studi perbandingan. Juga jangan lupa kita mengadakan studi yang lebih mendalam tentang struktur pertarifan di negara-negara ASEAN termasuk juga aspek non-tarif, sehingga studi perbandingan dapat memberikan bahan yang lebih terperinci. Kemudian jangan dilupakan bahwa *institutional building* di negara ASEAN merupakan aspek yang vital sekali. ASEAN dan khususnya Indonesia harus memperkembangkan lembaga-lembaga keuangan, industri dan mengubah struktur bisnis ke arah menciptakan kekuatan-kekuatan yang lebih besar.

Kesatuan-kesatuan yang lebih besar dan kerjasama erat antara sektor swasta Pemerintah dan birokrasi merupakan suatu keharusan untuk setiap negara ASEAN. Jika pola ini sama dan perkembangan lembaga-lembaga bisnis/keuangan/industri sudah terlihat ke arah persamaan, maka kemungkinan berhasilnya konsep ASEAN Free Trade Area tidak lagi merupakan khayalan.

Akan tetapi jalan ke arah itu bukan jalan yang mudah seperti dilihat oleh beberapa negara ASEAN. Menurut pandangan penulis lebih baik kita mengambil sikap yang lebih hati-hati dan mempelajari berbagai kemungkinan dengan lebih saksama dan akhirnya berhasil (walaupun mungkin memakan waktu), daripada secara tergesa-gesa oleh karena adanya berbagai macam urgency yang didasarkan atas terlalu banyak idealisme, pada akhirnya hanya macet. Menurut pandangan kami kemacetan atau kegagalan akan lebih parah daripada mengambil lebih banyak waktu untuk berpikir dan mempelajari secara mendalam. Kita tidak mempunyai waktu untuk gagal.

Tugas Indonesia dilihat dari sudut ketahanan nasionalnya adalah memperhatikan aspek-aspek di atas sehingga kita secara bersama-sama dan secara nasional dapat mempersiapkan metode, teknik, cara-cara, lembaga-lembaga, kerjasama yang lebih erat dan nyata daripada unsur-unsur pengambilan keputusan dan sebagainya. Dengan demikian secara konsepsional dan sistimatis kita memperlihatkan adanya sense of urgency dan sense of timing.

Demikian beberapa pemikiran yang masih bersifat sementara dan kami tidak mengklaim bahwa kertas kerja ini sudah mencakup semua aspek. Jika kertas kerja kami memberikan dorongan kepada pemikir, ahli strategi, ahli ekonomi, pemimpin bisnis dan industri, maka berarti telah mencapai sasarannya.

SUMBER-SUMBER

1. *Progress, Problems and Prospects in ASEAN Economic Co-operation : A Malaysian Perspection*, Lin See-yan, Chief Economist of Bank Negara Malaysia, the Central Bank of Malaysia.
2. *Singapore and ASEAN Economic Co-operation*, Lim Chong Yah, University of Singapore.
3. *Some Considerations for Accelerating Economic Cooperation in ASEAN*, Estrella D. Solidum, University of the Philippines.
4. *Progress, Problems and Prospects in ASEAN Economic Co-operation a View*, Prateep Sondysuwan dan Vijit Supinit, Assistant Directors, Department of Economic Research, Bank of Thailand.
5. *Economic Cooperation for ASEAN*, United Nations Study Team.

TABLE I

PER CAPITA GNP, POPULATION GROWTH RATE AND SIZE OF MANUFACTURING SECTOR
IN ASEAN COUNTRIES

(1) Country	(2) Per Capita GNP (1974) (US\$)	(3) Population Growth Rate (1974)	(4) Relative Size of Manufacturing Sector in relation to GDP (1973)
Singapore	2,465	1.37	24.8
Malaysia	723	2.54	14.8
Philippines	338	3.08	17.4
Thailand	292	3.09	17.1
Indonesia	123 (1973)	2.40	8.6

Source: Columns (2) and (3), from Statistical Appendix.
Column (4) from United Nations, *Monthly Bulletin of Statistics*,
Vol. 29, No. 9, Sept. 1975, pp. 207-209.

Dikutip dari paper Prof. Lim Chong Yah

TABLE III

VALUE OF EXTERNAL TRADE OF ASEAN COUNTRIES, 1974
(US\$ million)

Country	Imports	Exports	Total
Singapore	8,379	5,810	14,189
Indonesia	3,842	7,426	11,268
Malaysia	4,155	4,231	8,386
Philippines	3,436	2,671	6,107
Thailand	3,090	2,470	5,560

Source: Statistical Appendix.

Dikutip dari paper Prof. Lim Chong Yah

TABLE II

STATISTICAL APPENDIX MAIN MACRO ECONOMIC INDICATORS OF ASEAN COUNTRIES

Indicator	Country	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand
Population [Ann. Growth Rate] (Millions)	1974	127.59 (2.40)	11.70 (2.54)	41.46 (3.08)	2.22 (1.37)	41.02 (3.09)
Land Area (sq. km)		1,491,564	332,633	300,000	581	514,000
GNP (Millions of US\$)	1972 1973 1974	10,612.05 15,368.67	4,683.71 6,783.85 8,458.15	8,349.40 10,388.72 13,992.36	2,861.85 4,058.24 5,471.25	7,637.61 9,191.66 11,976.44
Per Capita GNP (US\$)	1972 1973 1974	87.25 123.34	425.41 594.55 722.92	213.87 258.30 337.49	1,331.09 1,853.08 2,464.53	197.97 231.00 291.96
GDP, 1970 Prices [Ann. Growth Rate] (Millions of US\$)	1972 1973 1974	9,178.31 (6.55) 10,026.51 (9.24)	4,119.28 (7.10) 5,190.46 (9.68)	6,661.88 (4.43) 7,247.58 (9.36) 7,250.74 (5.19)	2,712.75 (13.43) 3,422.91 (11.41) 3,918.72 (6.21)	7,209.48 (3.88) 8,234.11 (11.19) 8,455.46 (2.69)
Per Capita GDP, 1970 Prices [Ann. Growth Rate] (US\$)	1972 1973 1974	75.46 (3.27) 80.47 (6.64)	374.14 (4.18) 454.90 (5.83)	170.64 (1.43) 179.80 (6.15) 174.89 (2.04)	1,261.74 (11.32) 1,562.97 (9.39) 1,765.19 (4.78)	186.87 (0.64) 206.94 (7.81) 206.13 (-0.39)
Total Reserves (Millions of US\$)	1973 Dec. 1974 Dec. 1975	807 1,492 569 (Aug.)	1,342 1,618 1,461 (Aug.)	1,038 1,504 1,493 (Sept.)	2,286 2,816 3,049 (Mar.)	1,306 1,858 1,895 (Sept.)
Exports (F.O.B.) [Ann. Growth Rate] (Millions of US\$)	1972 1973 1974	1,778 (44.08) 3,211 (80.60) 7,426 (131.27)	1,717 (4.63) 2,987 (73.97) 4,231 (41.65)	1,105 (-1.52) 1,788 (61.81) 2,671 (49.38)	2,189 (24.16) 3,563 (67.34) 5,810 (58.61)	1,081 (30.08) 1,564 (44.68) 2,470 (57.93)
Imports (C.I.F.) [Ann. Growth Rate] (Millions of US\$)	1972 1973 1974	1,562 (41.61) 2,729 (74.71) 3,842 (40.78)	1,637 (13.84) 2,504 (52.96) 4,155 (65.93)	1,366 (2.71) 1,773 (29.80) 3,436 (93.80)	3,394 (19.46) 5,142 (51.50) 8,379 (62.95)	1,484 (15.40) 2,049 (38.07) 3,090 (50.81)

Sources: All statistics except on land area are adapted from statistical tables prepared by the Secretariat of the Japanese Asian Club for Promoting Economic and Cultural Communication (ACPCC) for the Second Asian Roundtable Conference in Tokyo, November 26-28, 1975. Land area statistics are obtained from Asia Research Bulletin, Vol. 4, No. 10, March 31st, 1975, pp. 64-65.

Dikutip dari paper Dr. Lin See-yan.

TABLE IV

GROWTH IN INTRA-ASEAN TRADE

Year	Intra-ASEAN Imports ¹			Intra-ASEAN Exports ²			Total Intra-ASEAN Trade		
	SDR million	Per cent		SDR million	Per cent		SDR million	Per cent	
		Annual growth	Share of ASEAN's total world imports		Annual growth	Share of ASEAN's total world exports		Annual growth	Share of ASEAN's total world trade
1970	1,073.9		14.6	1,277.5		20.8	2,351.4		17.4
1971	1,064.6	- 0.1	13.8	1,295.9	+ 1.4	20.4	2,360.5	+ 0.4	16.8
1972	1,220.3	+14.6	14.1	1,363.1	+ 5.2	18.8	2,583.4	+ 9.4	16.2
1973	1,615.3	+32.4	13.7	1,941.2	+42.4	17.6	3,556.5	+37.7	15.6
1974	2,136.6	+32.3	11.2	2,640.3	+36.0	14.3	4,776.9	+34.3	12.8

Source: IMF/IBRD, Direction of Trade, Annual 1970 - 74

¹ Based on imports of each ASEAN country. See Table 2

² Based on exports of each ASEAN country.

TABLE V

 =====
 MATRIX OF INTRA-ASEAN TRADE GROSS IMPORTS IN SDR MILLION
 =====

1970

Imports from \ Imports of	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	ASEAN
Indonesia	-	67.8	29.5	152.7	19.3	269.3
Malaysia	6.2	-	28.2	458.5	7.0	499.9
Philippines	1.6	2.2	-	8.8	3.3	15.9
Singapore	56.8	104.7	4.7	-	12.6	178.8
Thailand	11.1	49.8	0.3	48.8	-	110.0
ASEAN	75.7	224.5	62.7	668.8	42.2	1,073.9

1973

Imports from \ Imports of	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	ASEAN
Indonesia	-	50.1	1.6	224.7	6.6	293.0
Malaysia	12.0	-	12.7	696.6	11.4	732.7
Philippines	11.6	7.1	-	13.2	4.0	35.9
Singapore	110.9	155.5	7.2	-	24.1	297.7
Thailand	62.3	88.0	9.6	106.1	-	266.0
ASEAN	196.8	300.7	31.1	1,040.6	46.1	1,615.3

1974

Imports from \ Imports of	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	ASEAN
Indonesia	-	78.6	4.0	117.0	4.5	204.1
Malaysia	9.8	-	23.7	885.5	23.2	942.2
Philippines	9.7	15.1	-	18.9	3.4	47.1
Singapore	204.6	282.0	23.6	-	45.1	555.3
Thailand	60.2	119.7	13.2	194.8	-	387.9
ASEAN	284.3	495.4	64.5	1,216.2	76.2	2,136.6

Note: (i) Read downwards: the figures represent the imports of the respective ASEAN country from the other members.

(ii) Read across: the figures represent the exports of the respective ASEAN country to the other members since it is assumed that the recorded imports of one country are the exports of other members.

Source: IMF/IBRD, Direction of Trade, Annual 1970-74

TABLE VI

MATRIX OF ASEAN TRADE BALANCES
(based on gross imports¹ in SDR million)

Trade Balance of	With Indonesia	With Malaysia	With Philippines	With Singapore	With Thailand	With ASEAN
1970						
Indonesia	-	61.6	27.9	95.9	8.2	193.6
Malaysia	- 61.6	-	26.0	353.8	- 42.8	275.4
Philippines	- 27.9	- 26.0	-	4.1	3.0	- 46.8
Singapore	- 95.9	-353.8	- 4.1	-	- 36.2	-490.0
Thailand	- 8.2	42.8	- 3.0	36.2	-	67.8
1973						
Indonesia	-	38.1	- 10.0	113.8	- 55.7	86.2
Malaysia	- 38.1	-	5.6	541.1	- 76.6	432.0
Philippines	10.0	- 5.6	-	5.0	- 5.6	3.8
Singapore	-113.8	-541.1	- 5.0	-	- 82.0	-741.9
Thailand	55.7	76.6	5.6	82.0	-	219.9
1974						
Indonesia	-	68.8	- 5.7	- 87.6	- 55.7	- 80.2
Malaysia	- 68.8	-	8.6	603.5	- 96.5	446.8
Philippines	5.7	- 8.6	-	4.7	- 9.8	- 17.4
Singapore	87.6	-603.5	4.7	-	-149.7	-660.9
Thailand	55.7	96.5	9.8	149.7	-	311.7

¹Based on the import data (c.i.f.) of each individual ASEAN country, that is, the exports of each ASEAN country are assumed to be the same as the recorded imports of its partners.

Source: IMF/IBRD, *Direction of Trade, Annual 1970-74*

TABLE VII

MALAYSIA: TRADE WITH ASEAN COUNTRIES AND WORLD (SDR million)

SITC CODE	Indonesia		Philippines		Singapore		Thailand		Total ASEAN		Total World		Total ASEAN/ Total World per cent	
	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974
A. IMPORTS (CIF)														
0 Food	11.7	19.1	0.2	5.3	17.7	27.0	36.5	89.2	66.1	140.6	257.0	547.6	25.7	25.7
1 Beverages and Tobacco	0.1	0.1	-	-	1.4	1.1	-	0.2	1.5	1.4	30.3	39.7	5.0	3.5
2 Crude Materials Inedible	53.8	59.2	0.8	1.0	6.9	5.1	11.5	21.7	73.0	86.0	105.2	187.6	69.4	45.8
3 Mineral Fuels	0.3	0.4	0.2	-	26.6	114.5	0.1	0.2	27.2	115.1	169.0	346.7	16.1	33.2
4 Animal and Vegetable Oils and Fats	-	-	0.1	0.4	1.9	2.2	-	0.2	2.0	2.8	7.8	15.2	25.6	18.4
5 Chemicals	0.8	0.9	0.2	1.1	5.6	13.2	0.2	1.0	6.8	16.2	102.1	303.7	6.7	5.3
6 Manufactured Goods	-	0.4	0.3	5.9	21.6	36.2	0.7	6.1	22.6	48.6	251.6	644.2	9.0	7.5
7 Machinery and Transport Equipment	-	-	0.2	1.0	4.4	40.9	0.2	1.5	4.8	43.4	391.1	1,108.0	1.2	3.9
8 Miscellaneous Manufactured Articles	1.0	1.0	0.1	0.6	7.8	30.5	0.3	0.6	9.2	32.7	65.3	183.4	14.1	16.9
9 Miscellaneous Transactions and Commodities	-	0.1	-	-	10.7	12.7	0.4	0.5	11.1	13.3	21.4	31.2	51.9	42.6
0 to 9 Total	67.7	80.2	2.1	15.3	104.6	283.4	49.9	121.2	224.3	500.1	1,400.8	3,417.3	16.0	14.6
B. EXPORTS (FOB)														
0 Food	0.4	0.3	0.1	1.0	39.7	73.5	0.8	1.8	41.0	76.6	92.8	177.5	44.2	43.2
1 Beverages and Tobacco	-	-	1.4	2.2	2.4	3.2	-	-	3.8	5.4	7.1	8.4	53.5	64.3
2 Crude Materials Inedible	0.2	0.7	0.1	0.3	187.4	300.6	0.2	0.4	187.9	302.0	907.3	1,560.1	20.7	19.4
3 Mineral Fuels	3.3	0.7	22.4	-	55.2	144.8	8.5	23.9	89.4	187.2	119.4	287.8	74.9	65.1
4 Animal and Vegetable Oils and Fats	-	-	0.6	0.4	30.3	108.6	0.3	0.1	31.2	109.4	101.2	473.3	30.8	23.1
5 Chemicals	0.5	2.4	0.1	1.1	4.0	11.8	1.5	1.0	6.9	16.3	11.9	27.6	50.0	59.1
6 Manufactured Goods	2.7	4.5	3.9	5.7	15.2	37.4	1.1	1.3	22.9	48.9	306.4	679.3	5.9	7.2
7 Machinery and Transport Equipment	2.6	6.8	0.2	0.4	17.4	54.6	1.5	2.5	21.7	64.3	27.5	137.9	78.9	46.6
8 Miscellaneous Manufactured Articles	0.4	1.2	0.4	1.2	5.8	24.3	0.3	0.3	6.9	27.5	14.2	136.8	48.6	19.7
9 Miscellaneous Transactions and Commodities	0.5	1.4	-	0.1	5.7	4.1	0.3	0.4	6.5	6.0	18.9	33.4	34.4	18.0
0 to 9 Total	10.6	18.0	29.1	29.7	363.9	762.9	14.5	32.5	418.1	843.1	1,686.7	3,522.1	24.8	23.9
C. TRADE BALANCE:	-57.1	-62.2	27.0	14.4	259.3	479.5	-35.4	-88.7	193.8	343.0	285.9	104.8	-	-

Source: Department of Statistics, Malaysia

TABLE VIII

PHILIPPINES: TRADE WITH ASEAN COUNTRIES AND WORLD (SDR million)

SITC CODE	Indonesia		Malaysia		Singapore		Thailand		Total ASEAN		Total World		Total ASEAN/ Total World per cent	
	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974
A. IMPORTS (CIF)														
0 Food	0.9	0.2	0.1	0.1	12.8	0.1	0.2	14.0	121.8	293.7	0.2	4.8
1 Beverages and Tobacco	-	-	-	-	9.2	15.5	-
2 Crude Materials Inedible	-	0.2	0.5	0.1	0.1	1.1	0.1	0.2	2.1	70.7	140.2	0.3	1.5
3 Mineral Fuels	29.0	2.6	24.1	16.6	0.3	16.8	53.4	36.0	144.5	589.9	37.0	6.1
4 Animal and Vegetable Oils and Fats	0.4	0.2	0.5	1.1	0.9	1.3	6.3	10.9	13.6	11.9
5 Chemicals	-	0.5	2.3	145.4	467.6	0.3	0.5
6 Manufactured Goods	0.1	2.6	5.3	0.4	1.3	0.1	0.1	3.0	6.8	249.0	485.4	1.2	1.4
7 Machinery and Transport Equipment	0.1	0.1	0.1	3.0	2.2	0.2	0.1	3.3	2.5	426.4	707.1	0.8	0.4
8 Miscellaneous Manufactured Articles	-	0.1	0.3	0.1	0.3	31.5	54.9	0.3	0.6
9 Miscellaneous Transactions and Commodities	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1	0.1	0.2	0.8	5.2	118.8	3.9	0.7
0 - 9 Total	29.5	4.1	27.4	23.9	4.5	23.9	0.4	14.2	61.8	66.1	1,210.3	2,884.0	5.1	2.3
B. EXPORTS (FOB)														
SITC CODE														
0 Food	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.3	0.9	272.3	807.3	0.1	0.1
1 Beverages and Tobacco	0.2	0.4	0.2	0.4	15.4	26.6	1.3	1.5
2 Crude Materials Inedible	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.6	571.4	742.7	0.05	0.1
3 Mineral Fuels	0.2	0.1	0.1	5.9	2.2	0.1	0.1	6.2	2.4	17.3	14.4	35.8	16.7
4 Animal and Vegetable Oils and Fats	2.7	2.7	96.0	319.6	0.8
5 Chemicals	0.3	1.5	0.1	0.5	0.2	0.8	1.0	1.4	1.6	4.2	5.2	12.6	30.8	33.3
6 Manufactured Goods	0.3	2.3	0.1	2.2	0.7	6.2	1.0	0.4	2.1	11.1	68.9	191.2	3.1	5.8
7 Machinery and Transport Equipment	0.1	2.2	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5	3.1	0.8	6.3	62.5	49.2
8 Miscellaneous Manufactured Articles	0.5	0.9	0.3	0.2	1.4	0.8	0.5	1.5	3.1	9.2	55.1	16.3	5.6
9 Miscellaneous Transactions and Commodities	0.3	0.2	0.1	0.7	0.2	0.1	1.4	5.2	90.3	1.9	1.6
0 - 9 Total	1.7	7.9	0.6	3.8	7.3	15.3	3.2	2.9	12.8	29.9	1,061.7	2,266.1	1.2	1.3
C. TRADE BALANCE														
.... Negligible														
	-27.8	3.8	-26.8	-20.1	2.8	8.6	2.8	-11.3	-49.0	-36.2	-148.6	-617.9	-	-

Sources: Official Publications, the Philippines

TABLE IX

INDONESIA, SINGAPORE AND THAILAND: TRADE WITH ASEAN COUNTRIES AND WORLD
(SDR million)

	Malaysia		Philippines		Singapore		Thailand		Total ASEAN		Total World		Total ASEAN/ Total World per cent	
	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974
I. Indonesia														
A. Imports (CIF)	6.2	9.8	1.6	9.7	56.8	204.6	11.1	60.2	75.7	284.3	1,001.5	3,093.2	7.6	9.2
B. Exports (FOB)	88.7	58.4	25.6	1.9	171.9	457.8	0.2	6.8	286.4	524.9	1,160.7	6,138.1	24.7	8.6
C. Trade Balance	82.5	48.6	24.0	- 7.8	115.1	253.2	-10.9	-53.4	210.6	240.6	159.2	3,044.9	-	-
II. Singapore														
A. Imports (CIF)	152.7	117.0	458.5	895.5	8.8	18.9	48.8	194.8	668.8	1,216.2	2,461.3	7,080.0	27.2	17.2
B. Exports (FOB)	59.1	58.7	339.7	654.0	4.2	35.3	51.2	114.3	454.2	862.3	1,553.7	4,519.0	29.2	19.1
C. Trade Balance	-93.6	-58.3	-118.8	-231.5	-4.6	16.4	2.4	-80.5	-214.6	-353.6	-907.6	-2,561.0	-	-
III. Thailand														
A. Imports (CIF)	19.3	4.5	7.0	23.2	3.3	3.4	12.6	45.1	42.2	76.2	1,298.5	2,649.6	3.3	2.9
B. Exports (FOB)	16.4	78.1	39.9	103.8	0.8	18.4	49.0	189.9	106.1	390.2	710.2	2,053.8	14.9	19.0
C. Trade Balance	-2.9	73.6	32.9	80.6	-2.5	15.0	36.4	144.8	63.9	314.0	-588.3	-595.8	-	-

Source: IMF/IBRD, *Direction of Trade, Annual 1970-74*

TABLE X

DIRECTOR OF TRADE 1973

Exporting Countries	Importing Countries	(Million US Dollars)													
		Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Sub-Total	U.S.	Japan	EEC	Socialist Countries	Australia S. Africa	Middle East	Other Asia	Others*
Indonesia	-	34.3	1.9	341.0	1.1	378.30	465.4	1,707.4	323.7	15.9	54.9	-	169.1	96.7	3,211.4
Malaysia	14.5	-	15.3	693.9	16.7	742.40	322.9	539.9	652.9	222.5	81.3	36.3	203.5	182.3	2,984.0
Philippines	14.3	5.6	-	14.8	4.2	38.90	686.7	679.9	230.5	14.5	24.0	3.0	121.4	87.4	1,886.3
Singapore	133.8	187.5	8.7	-	29.5	359.5	612.9	285.8	611.8	187.4	162.4	82.3	928.5	370.0	3,603.6
Thailand	75.1	95.7	11.6	130.6	-	313.0	160.1	412.7	268.4	6.7	17.4	39.6	261.8	81.40	1,581.1
Sub-Total	237.7	323.1	37.5	-180.3	53.5										
U.S.	512.6	205.0	506.7	765.4	290.7										
Japan	799.7	541.2	561.0	926.9	740.8										
EEC	477.1	508.9	227.3	713.3	411.6										
Socialist Countries	72.2	165.2	25.8	266.1	14.5										
Australia, S. Africa	90.2	202.2	104.2	199.0	90.8										
Middle East	-	66.5	198.8	540.4	120.4										
Other Asia	419.5	239.8	55.2	334.3	148.2										
Others*	120.8	137.9	73.2	141.4	204.2										
Total	2,729.8	2,389.8	1,789.7	5,067.1	2,074.7										

* Including errors

Source: Basic data from Direction of Trade Yearbook.

TABLE XI

TOTAL TRADE BETWEEN COUNTRIES 1973

	(Million US Dollars)														
	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Sub-Total	U.S.	Japan	EEC	Socialist Countries	Australia S. Africa	Middle East	Other Asia	Others	Total
Indonesia	-	48.8	16.2	474.8	76.2	616.0	978.0	2,507.1	800.8	88.1	145.1	-	588.6	217.5	5,941.2
Malaysia	48.8	-	20.1	881.4	114.4	1,065.5	527.9	1,081.1	1,161.8	387.7	283.5	102.8	443.3	320.2	5,373.8
Philippines	16.2	20.9	-	23.5	15.8	76.4	1,193.4	1,240.9	457.8	40.3	128.2	201.8	176.6	160.6	3,676.0
Singapore	474.8	881.4	23.5	-	160.1	1,539.8	1,378.3	1,215.7	1,325.1	453.5	361.4	622.7	1,262.8	511.4	8,670.7
Thailand	76.2	114.4	15.8	160.1	-	366.5	450.8	1,153.5	680.0	21.2	108.2	160.0	430.0	285.6	3,655.8
Total	616.0	1,065.5	76.4	1,539.8	366.5	3,664.2	4,528.4	7,198.3	4,425.5	990.8	1,026.4	1,087.3	2,901.3	1,495.3	27,310.5

Source: As Table II

TABLE XII

TRADE BETWEEN COUNTRIES AS PERCENTAGE OF TOTAL TRADE 1973

	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Sub-Total	U.S.	Japan	EEC	Socialist Countries	Australia S. Africa	Middle East	Other Asia	Others	Total
Indonesia	-	0.82	0.27	7.99	1.28	10.37	16.46	42.20	13.48	1.48	2.44	-	9.91	3.66	100.0
Malaysia	0.91	-	0.38	16.40	2.13	19.83	9.82	20.12	21.62	7.21	5.28	1.91	8.25	5.96	100.0
Philippines	0.44	0.57	-	0.64	0.43	2.08	32.46	33.75	12.45	1.10	3.49	5.47	4.80	4.37	100.0
Singapore	5.48	10.17	0.27	-	1.85	17.76	15.90	14.02	15.28	5.23	4.17	7.18	14.56	5.90	100.0
Thailand	2.08	3.13	0.43	4.38	-	10.02	12.33	31.55	18.60	0.58	2.96	4.37	11.76	7.81	100.0
Total	2.26	3.90	0.28	5.64	1.34	13.42	16.58	26.36	16.20	3.63	3.76	3.96	10.62	5.48	100.0

Source: As Table II